



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kab/Kota Sumatera Utara (2018-2019)

Fitri Dewi Sartika Ritonga^{1*}, Ratna Sari Dewi²
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

ABSTRACT: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah baik secara simultan maupun parsial pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian Kuantitatif, dengan jumlah sampel 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk periode 2018-2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh melalui situs internet (www.bps.go.id) dan situs Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Alokasi Belanja Daerah.

Submitted: 29 September; Revised: 30 September; Accepted: 1 Oktober

Corresponding Author: fitridewisartika1234@gmail.com

LATAR BELAKANG

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokrasi menjadi suatu fenomena global di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan Negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja financial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Perda (PP.No.12 Tahun 2019). Sedangkan menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang- Undang Nomor 33/2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota telah diberi wewenang untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah. Sehingga akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber daya keuangan. Untuk itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya yang menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari seluruh penyerapan daerah yaitu pemungutan dan retribusi daerah serta hasil lainnya. Perolehan PAD yang tinggi akan membuktikan kesanggupan daerah mencapai harapan daerah dibidang keuangannya. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong untuk melakukan penanaman Daerah untuk kepentingan belanja Daerah pemerintah daerah sehingga kemampuan pelayanan masyarakat sempurna. Peningkatan PAD dapat didorong dengan mengembangkan hasil pertanian maupun pariwisata yang terdapat di daerah. DAU ialah bagian dari dana perimbangan dari pemerintah yang penyalurannya berfokus pada keseimbangan dan keadilan sejalan dengan kegiatan pemerintah.

KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2012:132) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Halim (2017:96) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah", pengertian lain menurut Erlina dan Rasdianto (2013:93) menyatakan bahwa "kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

H1: Pendapatan Asli Daerah

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting, (Darwanto dan Yustikasari 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa Dana Alokasi Umum yang biasa disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian Dana Alokasi Umum berdasarkan penghasilan daerah yang cenderung mengalami ketimpangan antar daerah yang cenderung mengalami ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

H2: Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

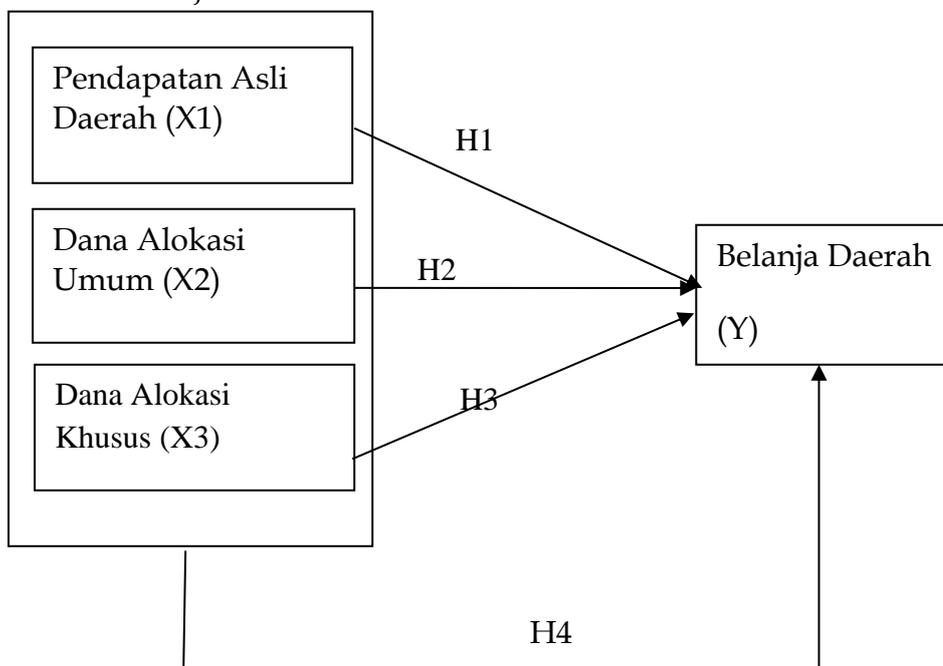
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

H3: Dana Alokasi Khusus

Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana Belanja Daerah disusun setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Belanja Daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Adanya Belanja Daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya.

H4: Belanja Daerah



Gambar 1. Karangka Konseptual

METODOLOGI

Populasi dan Sampel

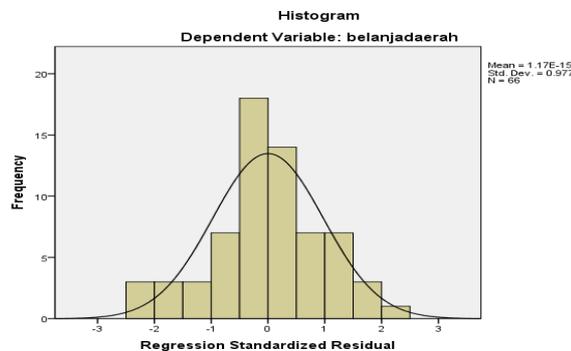
Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Purwanto: 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada pemerintah daerah Kabupaten/Sumatera Utara yang meliputi 33 daerah Kabupaten/Kota sehingga total populasi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode sampling jenuh. Dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian dengan Populasi dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada pemerintah daerah Kabupaten/Sumatera Utara yang meliputi 33 daerah Kabupaten/Kota sehingga total populasi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 Kabupaten/Kota.

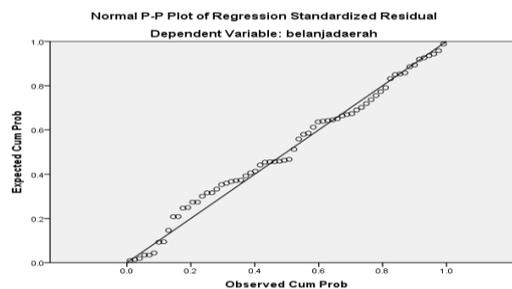
Analisis Data yaitu Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji t, Uji f, Analisis Regresi Berganda, Analisis Determinasi (R).

HASIL

Berikut hasil tes data



Gambar 1. Hinstogram Normalitas



Gambar 2. Normal IP-plot

Dari kedua grafik di atas dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan peneliti berdistribusi normal. Pada Grafik Histogram menunjukkan bahwa data

yang digunakan mengikuti kurva berbentuk seperti lonceng ke arah kiri atau kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Pada Grafik *normal p-plot* menunjukkan bahwa data yang dipakai peneliti tersebar di dekat garis diagonal yang ada pada grafik, hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan peneliti berdistribusi normal.

**Tabel 1 Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	17596789.812	38990722.842		.451	.653		
Pendapatan Asli Daerah	1.317	.074	.486	17.718	.000	.381	2.625
Dana Alokasi Umum	.853	.128	.326	6.658	.000	.120	8.350
Dana Alokasi Khusus	2.684	.368	.284	7.293	.000	.189	5.282

Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Olahan Data SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada indikasi multikolinieritas. Nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 menandakan bahwa tidak ada indikasi multikolinieritas. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,381 dan VIF sebesar 2.625, variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai tolerance sebesar 0,120 dan VIF 8.350, variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai tolerance sebesar 0,189 dan VIF sebesar 5.282. Setiap variabel memenuhi syarat nilai *tolerance* dan VIF, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel 2 Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.991 ^a	.982	.981	1.138E8	1.764

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik Durbin Watson (DW) sebesar 1,764. Angka Durbin Watson (DW) sebesar 1,764 lebih besar dari

1,731 (du) dan lebih besar dari 2,269 (4-du) atau dapat dinyatakan bahwa $1,731 < 1,764 < 2,269$ ($du < dw < 4-du$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

**Tabel 3 Uji Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 ^a	.982	.981	1.138E8

- a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Nilai R mempunyai interval 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R (mendekati 1) semakin baik hasil untuk model regresi tersebut. Dari hasil uji Analisis koefisien determinasi (R) yang diperoleh adalah 0,981 atau mendekati 1, maka model tersebut semakin kuat menerangkan hubungan variabel dependen.

**Tabel 4 Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17596789.812	38990722.842		.451	.653
Pendapatan Asli Daerah	1.317	.074	.486	17.718	.000
Dana Alokasi Umum	.853	.128	.326	6.658	.000
Dana Alokasi Khusus	2.684	.368	.284	7.293	.000

Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Olahan Data SPSS

Berdasarkan pengujian secara parsial, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah dikarenakan mempunyai t hitung $17,718 > t$ tabel 1,99897 dan memiliki signifikan = $0,000 < \alpha = 5\%$, dan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana dalam membiayai Alokasi Belanja Daerah.

Berdasarkan pengujian secara parsial Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Y), Dana Alokasi Umum (X2) mempunyai t hitung 6,658 $> t$ tabel 1,99897 dan memiliki signifikan = $0,000 < \alpha = 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah (Y). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan untuk anggaran Belanja Daerah.

Berdasarkan pengujian secara persial Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Y), Dana Alokasi Khusus (X2) mempunyai t hitung 7,293 > t table 1,99897 dan memiliki signifikansi = 0,000 < α = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah.

**Tabel 5 Uji f
ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.432E19	3	1.477E19	1140.234	.000 ^a
	Residual	8.033E17	62	1.296E16		
	Total	4.512E19	65			

- a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
 b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan hasil Uji F dapat diketahui bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Alokasi Belanja Daerah (Y). Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 1.140.234 > F tabel sebesar 2,52 dengan signifikansi = 0,000 < α = 5%, maka H1 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Alokasi Belanja Daerah.

DISKUSI

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana dalam membiayai Alokasi Belanja Daerah. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan untuk anggaran Belanja Daerah. PAD di peroleh dari iuran masyarakat seperti pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran Belanja Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin memungkinkan daerah tersebut bisa terpenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus berharap kepada pemerintah pusat, yang berarti pemerintah daerah mampu untuk mandiri terhadap manajemen keuangan transparansi dan akuntabel. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri dan merupakan elemen yang sangat penting bagi suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjannya dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Hasil ini sama dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah penelitian Priambudi (2016) yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah

menunjukkan hubungan yang signifikan dengan Alokasi Belanja Daerah. Penelitian oleh Puput Purpitasari (2015) juga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah

Berdasarkan hasil hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah, karena Dana Alokasi Umum merupakan sumber dana dalam membiayai Alokasi Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum Pemerintahan daerah otonomi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan adanya aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2004. Hal ini sebabkan karena dana alokasi umum salah satunya dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk kesamaan dalam kemampuan keuangan daerah dan dana tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hal ini sama dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah penelitian Priambudi (2016) yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum menunjukkan hubungan yang signifikan dengan Alokasi Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dapat pula dijelaskan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) di suatu daerah, menunjukkan bahwa daerah tersebut mempunyai sasaran tertentu, terutama dalam bidang pembangunan yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi daerah, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana fisik sehingga Dapat disimpulkan bahwa semakin merata perekonomian suatu daerah maka pertumbuhan ekonominya akan semakin tinggi.

Hal ini sama dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah penelitian Priambudi (2016) yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus menunjukkan hubungan yang signifikan dengan Alokasi Belanja Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah

Berdasarkan Hipotesis Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa PAD di daerah telah dimanfaatkan secara maksimal dan daerah sangat leluasa dalam memanfaatkan PAD dalam Belanja Daerahnya. Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi lebih mampu memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik. Sementara itu, peningkatan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh suatu daerah sangat menentukan seberapa besar target pembangunan daerah yang dianggarkan, khususnya belanja Daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Tingginya tingkat pembangunan infrastruktur yang ada menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dapat pula dijelaskan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) di suatu daerah, menunjukkan bahwa daerah

tersebut mempunyai sasaran tertentu, terutama dalam bidang pembangunan yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi daerah, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana fisik sehingga Dapat disimpulkan bahwa semakin merata perekonomian suatu daerah maka pertumbuhan ekonominya akan semakin tinggi.

Hal ini sama dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah Rihfenti Ernayani (2017) Yang menyebutkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Selanjutnya Puput Purpitasari (2015) juga menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Alokasi Belanja Daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Pengujian, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2019.

Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2019.

Secara Parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2019.

Secara Parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2019.

SARAN DAN PENELITIAN LANJUTAN

Adapun saran yang disampaikan peneliti dalam mengadakan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah

Sebaiknya penelitian ini dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD, agar Pemerintah Daerah lebih serius menanggapi masalah belanja daerah, karena jika pemerintah terlalu banyak menggunakan anggaran untuk membiayai belanja pegawai maka kemandirian keuangan daerah tidak berjalan dengan baik dan akan sulit untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bagi Masyarakat

Sebaiknya masyarakat turut mengambil andil dalam rangka pembangunan di daerahnya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan memberikan masukan-masukan positif demi mewujudkan masyarakat madani, terciptanya Kinerja yang baik,

dan mengembangkan model pembangunan berkeadilan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperbanyak kabupaten/kota yang akan diuji, sehingga akan diperoleh sampel penelitian yang lebih banyak dan disarankan juga agar mengambil sampel penelitian dari kabupaten/kota di luar Provinsi Sumatera Utara, ini dimaksudkan agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/kota di luar Provinsi Sumatera Utara.

ACKNOWLEDGMENT

Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga saya, terutama kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan men support saya selama ini, dan juga kepada abang-abang saya yang telah membantu kedua orang tua saya dalam membiayai saya selama kuliah. Kebaikan kalian tidak bisa saya balas melainkan hanya doa yang dapat saya kirimkan. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah SWT. Terima kasih juga kepada pembimbing saya Ibu Ratna Sari Dewi S.Pd, M.Si yang membimbing saya selama ini. Dan juga rekan-rekan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto dan Yulia Yustikasari.(2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.*Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.*
- Erlina, Rasdianto, 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, *Medan: Brama Ardian.*
- Halim, Abdul, 2017. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3, Salemba Empat, *Jakarta.*
- <http://www.sumut.bps.go.id>
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.*
- Mardiasmo. 2012. Otonomi dan Manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi: *Yogyakarta.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Priambudi, Wimpi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi *Universitas Negeri Yogyakarta.*

Puput Purpitasari, 2015. Pengaruh Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Daerah. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

Rihfenti Ernayani, 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. Jurnal. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi *Universitas Balikpapan*.